

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Amrullah, M.Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan V, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Cetakan XVII, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hosen, Halius, 2008, *Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Legal Development Faculty, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Pencucian Uang*, Cetakan I, Books Terrace & Library, Bandung.
- _____, 2008, *Negeri Sang Pencucian Uang*, Cetakan I, Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima.
- M.Yanuar, Purwaning, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Cetakan I, PT Alumni, Jakarta.
- Muladi, 2008, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2002, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetya, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santosa, Bima Priya, 2010, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.
- Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Cetakan III, Jala Permata, Jakarta.

- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Subekti, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan XXIX, AKA, Jakarta.
- Tobing, Raida L, 2011, *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung.
- Yusuf, Muhammad, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Cetakan I, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN RI Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN RI Tahun 2001 No. 134, TLN No. 4150.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.15 Tahun 2002, LN RI Tahun 2002 No. 30, TLN No. 4191.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, UU No. 1 Tahun 2006, LN RI Tahun 2006 No. 18, TLN No. 4607.

- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN RI Tahun 2010 No. 122, TLN No. 5164.
- _____, *Peraturan Presiden tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Perpres No. 6 Tahun 2012.
- _____, *Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Perpres No. 48 Tahun 2012.
- _____, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*, PERMA Nomor 1 Tahun 2013 .

3. KAMUS

Marbun, B.N. 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

4. JURNAL

Ferry Fernanda, "*Perampasan Aset (forfeiture legal gain) Hasil Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013; diunduh dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/487> pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.32 WIB

5. SUMBER INTERNET

KBBI.web.id/pemberantasan, diakses pada tanggal 26 September 2015, pukul 23.00 WIB.

KBBI.web.id/upaya, diakses tanggal 26 September 2015, pukul 23.20 WIB.

Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Penelusuran Aset (Asset Tracing)*,

<http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling/File/PENELUSURAN%20ASET.pdf> pada tanggal 28 November 2015 pada pukul 19.35 WIB

Maggie Regina Imbar, *Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, diunduh <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292085&val=1030&title=PERAN%20TERHADAP%20ASSET%20RECOVERY%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20%20PENCUCIAN%20UANG> pada tanggal 10 Oktober pukul 19.45 WIB

Yunus Husein, *Sosialisasi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 2010. Diunduh dari <http://ppatk.go.id/ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html> pada tanggal 25 November 2015 pukul 20.20 WIB

<http://peraturan.go.id/ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 26 November 2015 pada pukul 22.10 WIB

http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/perma-nomor-1-tahun-2013-taring-baru-perampasan-aset-para-pelaku-pencucian-uang_55290c5ef17e6126268b4850 diakses pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 13.25 WIB

6. SUMBER LAINNYA

Tim Penyusun, 2012, *Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta.

Ramelan, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hangkoso Satrio, *Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1454 K/PID.SUS/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

